



BPKAD
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



RENCANA KERJA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2025



BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera untuk jangka waktu satu tahun. Rencana Kerja tersebut memuat prioritas kegiatan, sasaran kegiatan, rencana kerja, dan pendanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat pentingnya peranan Rencana Kerja sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maka proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perbaikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan secara berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, baik secara substansi perencanaan, khususnya urusan Keuangan. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif akan menjadi masukan dalam penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Pagu Indikatif, Indikator dan Target Kinerja serta penyelarasan dengan Sasaran dan Prioritas Nasional, dan identifikasi Program dan Kegiatan menurut kewenangan Provinsi masa yang akan datang.

Kami ucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Palembang, 28 Juni 2024

Kepala,



YOSI HERVANDI, SE., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 198208162001121004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLAKEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023.....	 8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	8
2.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan.....	19
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	26
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	30
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.....	 45
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	45
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	 49
BAB V PENUTUP.....	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.....	3

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023 dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	9
Tabel 2.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan.....	19
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	24
Tabel 2.4 Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja BPKAD.....	27
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	32
Tabel 2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	44
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.....	47
Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, penyusunan anggaran Tahun 2025 meliputi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun anggaran 2025. Anggaran disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Rencana Strategis PD) Tahun 2024-2026. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sedangkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 yang disusun menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Rencana Kerja) Tahun 2025.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 memiliki makna bahwa perlu adanya penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah yang ditetapkan untuk kurun waktu jangka menengah (2024-2026). Kemudian, berpedoman pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 bermakna bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 perlu menyesuaikan koridor perencanaan Pemerintah Pusat, antara lain prioritas nasional dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional berarti dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diperlukan penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan Tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta program strategis nasional lainnya.

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) Tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima Tahunan ke dalam perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamanatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahun sebelumnya, target kinerja Tahun 2025 dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Dalam prosesnya penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan melakukan kajian terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan pada akhirnya Rencana Kerja Perangkat Daerah digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

[illegible]

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- r. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 5);
- s. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5);
- t. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 09);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja tahunan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 secara sistematis dan terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Rencana Kerja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan.

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023.

Berisikan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi dan Reviu terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan Rencana Kerja dan Pendanaan, Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bab. V Penutup

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Capaian Rencana Strategis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kualitas penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana Kerja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan pencapaian Rencana Strategis adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Untuk penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2023. Juga disajikan perkiraan capaian target Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan Tahun 2024. Pada Tahun 2023 Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan sebanyak 3 program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp4.359.051.465.402,00. Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.561.041.303.901,22 atau sebesar 81,69 %.

a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024 Provinsi Sumatera Selatan

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	100%	100%			98,89			
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	94,61	100%	100%	100
	1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku	100	2 Buku	2 Buku	100
	2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lapir yang disusun	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	1 Buku	100
	7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	9 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	90	8 Laporan	8 Laporan	88,89
II	Administrasi Keuangan	Administrasi, Keuangan, dan Administrasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	93,78	100%	100%	100%
	8) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Realisasi Kouangan Perangkat Daerah Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	100 ASN/Orang/ Bulan	85 ASN/Orang/ Bulan	83 ASN/Orang/ Bulan	83 ASN/Orang/ Bulan	92	83 ASN/Orang/ Bulan	83 ASN/Orang/ Bulan	100
	9) Penyediaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	5 ASN dan 85 Non ASN	5 ASN dan 85 Non ASN	5 ASN dan 85 Non ASN	5 ASN dan 85 Non ASN	100	5 ASN dan 85 Non ASN	5 ASN dan 85 Non ASN	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5*7+9	11=10/4
10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator	100	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator	100
11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	100	10 Dokumen	10 Dokumen	100
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
13	Pengelolaan dan Penyusunan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksaan dan verifikasi hibah	9 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100	3 Laporan	3 Laporan	100
15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	89,43	100%	100%	100%
16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	100	40 Laporan	40 Laporan	100
17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	100	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	100
18	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-JGR	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	4 Laporan	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan dengan Tahun 2022	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	97,91	100%	100%	100%
21	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakalan Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	-	-	300 Orang/Setel	300 Orang/Setel	100	100 Orang/4 Setel	100 Orang/4 Setel	100
22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Analisa Jabatan, Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	98	3 Laporan	3 Laporan	100
23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan Kinerja Pegawai	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	96	13 Laporan	13 Laporan	100
24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat	45 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	100	30 Orang	30 Orang	100
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	99,27	100%	100%	100%
25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	41 Jenis	100	41 Jenis	41 Jenis	100
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	98	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	100
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makanan Minum	Jenis Alat Pembersih dan Jenis Bahan pembersih	10 Jenis Alat Pembersih dan 50 Jenis Bahan Pembersih	10 Jenis Alat Pembersih dan 50 Jenis Bahan Pembersih	10 Jenis Alat Pembersih dan 50 Jenis Bahan Pembersih	100	10 Jenis Alat Pembersih dan 50 Jenis Bahan Pembersih	10 Jenis Alat Pembersih dan 50 Jenis Bahan Pembersih	100
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan	40 Jenis yang Dicetak, 45.000 Counter	40 Jenis yang Dicetak, 45.000 Counter	40 Jenis yang Dicetak, 45.000 Counter	40 Jenis yang Dicetak, 45.000 Counter	100	40 Jenis yang Dicetak, 45.000 Counter	40 Jenis yang Dicetak, 45.000 Counter	100
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	100	7 Surat Kabar	7 Surat Kabar	100
30	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu di ruang konsultasi	10.000 tamu	10.000 tamu	10.000 tamu	10.000 tamu	100	10.000 tamu	12.000 tamu	120
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	100	300 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	300 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
32	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	100	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	100	100
33	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	100	7 Aplikasi	100	100
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	1000 surat	1000 surat	1000 surat	1000 surat	100	1200 surat	1200 surat	112
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	4 Rekening Listrik, 24 Rekening Telepon, 3 Rekening Air, 5 Rekening Internet	4 Rekening Listrik, 24 Rekening Telepon, 3 Rekening Air, 5 Rekening Internet	6 Rekening Listrik, 12 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	100	6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	100	100
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	100%	100%	100%	100%	97,45	100%	100%	100%
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	21 R4, 20 R2	24 R4, 20 R2	24 R4, 20 R2	24 R4, 20 R2	100	27 R4, 19 R2	27 R4, 19 R2	100
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	21 R4, 20 R2	24 R4, 4 R2	24 R4, 4 R2	24 R4, 4 R2	80	18 R4, 1 R2	18 R4, 1 R2	237,50
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10 Jenis Peralatan Kantor, 10 Jenis Perlengkapan Kantor	2 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	99	2 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya	50

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 Unit Gedung Kantor, 2 Gudang Arsip	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Rumah Dinas	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Rumah Dinas	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Rumah Dinas	100	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Rumah Dinas	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Rumah Dinas	100
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	APBD yang Tepat Waktu	100%	100%			85,63			
40	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Rencana Anggaran Daerah	100%	100%	98.93%	98.93%	98.93	100%	100%	100%
41	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	300 Buku Rancangan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 300 Buku PPAS	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	100	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	100
42	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	300 Buku Rancangan Perubahan KUA, 300 Buku Perubahan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 300 Buku Perubahan PPAS	100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 Buku Perubahan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku Perubahan PPAS	100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 Buku Perubahan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku Perubahan PPAS	100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 Buku Perubahan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku Perubahan PPAS	100	100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 Buku Perubahan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku Perubahan PPAS	100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 Buku Perubahan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku Perubahan PPAS	100
43	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Verifikasi RKA SKPD yang diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	-	-	-	-	-	-
44	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Verifikasi Perubahan RKA SKPD yang diverifikasi	40 Dokumen	40 Dokumen	-	-	-	-	-	-
45	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	300 Buku Raperda, 300 Buku Perda, 300 Buku Rapergub dan 300 Buku Pergub	100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Rapergub dan 100 Buku Pergub	100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Rapergub dan 100 Buku Pergub	100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Rapergub dan 100 Buku Pergub	98	100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Rapergub dan 100 Buku Pergub	100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Rapergub dan 100 Buku Pergub	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
I	2 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Jumlah Perda yang dihasilkan	4 3 Dokumen	5 1 Dokumen	6 1 Dokumen	7 1 Dokumen	8=7/6 98	9 1 Dokumen	10=5+7+9 1 Dokumen	11=10/4 100
II	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	100%	100%	100%	98,06%	95,94	100%	100%	100%
47	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	51 SK	17 SK	17 SK	16 SK	95	17 SK	17 SK	100
48	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	51 SK	17 SK	17 SK	16 SK	95	17 SK	17 SK	100
49	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	51 SK	17 SK	17 SK	17 SK	100	17 SK	17 SK	100
III	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	100%	100%	100%	92,14	100%	100%	100%
50	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonstruksi pengelolaan kas daerah	18 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100
51	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provinsi	SMI	SMI	SMI	SMI	85	SMI	SMI	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
52	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	9 Laporan/Jenis Dana Transfer	3 Laporan/Jenis Dana Transfer	3 Laporan/Jenis Dana Transfer	3 Laporan/Jenis Dana Transfer	100	3 Laporan/Jenis Dana Transfer	3 Laporan/Jenis Dana Transfer	100
53	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai	6 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	100
54	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pencatatan Atas SP2D	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	100	40 OPD	40 OPD	100
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
55	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO, dan Beban	Jumlah Laporan rekonsiliasi	1.851 Buku	617 Buku	617 Buku	617 Buku	100	617 Buku	617 Buku	100
56	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	100	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	100
57	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Raperdub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Raperdub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Raperdub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Raperdub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi	100	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Raperdub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Raperdub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
v	Penunjang Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	85,50	100%	100%	100%
58	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI	SMI	SMI	SMI	98	SMI	SMI	100
59	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	70	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100
60	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	45	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100
61	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	100
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	APBD yang Tepat Waktu	100%	100%			93,74			
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	93,74	100%	100%	100%
62	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	2 Buku, 41 OPD	2 Buku, 41 OPD	2 Buku, 41 OPD	2 Buku, 41 OPD	100	2 Buku, 40 OPD	2 Buku, 40 OPD	100
63	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 Laporan	20 Laporan	41 Laporan	35 Laporan	80	40 Laporan	40 Laporan	1
64	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	41 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	95	40 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	40 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	100
65	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	85	40 OPD	40 OPD	100
66	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	27 Laporan Penilaian BMD	28 Laporan Penilaian BMD	50 Laporan Penilaian BMD	71 Laporan Penilaian BMD	100	80 Laporan Penilaian BMD	78 Laporan Penilaian BMD	289

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program dan Kegiatan Akhir Periode Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2022	Targe dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sampai dengan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5-7+9	11=10/4
67	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terinventarisasi	Sertifikat, BPKB Kendaraan Bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB Kendaraan Bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB Kendaraan Bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB Kendaraan Bermotor, Pengamanan BMD	95	Sertifikat, BPKB Kendaraan Bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB Kendaraan Bermotor, Pengamanan BMD	100
68	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	22 SK/MoU/PKS (Kerjasama)	46 SK/MoU/PKS (Kerjasama)	40 SK/MoU/PKS (Kerjasama)	10 SK/MoU/PKS (Kerjasama)	100	25 SK/MoU/PKS (Kerjasama)	25 SK/MoU/PKS (Kerjasama)	236
69	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	41 Berita Acara Rekonsiliasi BMD dengan SKPD dan 362 Berita Acara Rekonsiliasi BMD SMA/SMK/SLB	41 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dg OPD dan 362 BA Rekon dg SMA/SMK/SLB	41 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dg OPD dan 362 BA Rekon dg SMA/SMK/SLB	41 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dg OPD dan 362 BA Rekon dg SMA/SMK/SLB	95	40 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dg OPD dan 452 BA Rekon dg SMA/SMK/SLB	40 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dg OPD dan 452 BA Rekon dg SMA/SMK/SLB	100
70	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	100	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	100

Dari Data sebagaimana tabel 2.1 diatas, Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2024-2026 sampai dengan Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
 - 1) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 Urusan, 3 Program, serta 13 Kegiatan dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan.
 - 2) Adapun target 3 Indikator Kinerja Program dengan persentase untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mencapai 95,89%, Program Pengelolaan Keuangan Daerah mencapai 85,53%, dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah mencapai 93,74%.
- b. Perkiraan Capaian Target Rencana Strategis Tahun 2024-2026
 - 1) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 Urusan, 3 Program, serta 13 Kegiatan dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan.
 - 2) Dari 13 Indikator Kinerja Kegiatan, diperkirakan dapat memenuhi target Rencana Strategis.

2.2 Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan BPKAD
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Refocussing (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Selisih Anggaran
1	2	3	4	5	6 = 4-3
i	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	38.282.205.226,00	36.274.172.223,00	94,75	(2.008.033.003,00)
	i Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.400.519.075,00	1.310.043.441,00	93,54	(90.475.634,00)
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	94.520.000,00	94.519.000,00	100	(1.000,00)
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	96.924.050,00	96.924.050,00	100	0,00
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	122.180.000,00	121.724.500,00	99,63	(455.500,00)
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	126.791.500,00	126.681.100,00	99,91	(110.400,00)
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	127.480.000,00	126.000.000,00	98,84	(1.480.000,00)
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.253.525,00	77.253.525,00	100	0,00
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	755.370.000,00	666.941.266,00	88,29	(88.428.734,00)
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.863.447.549,00	17.484.450.805,00	92,69	(1.378.996.744,00)
	8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.659.002.549,00	13.293.461.455,00	90,68	(1.365.541.094,00)
	9 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.636.564.000,00	2.625.594.000,00	99,58	(10.970.000,00)
	10 Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	713.880.000,00	712.668.000,00	99,83	(1.212.000,00)
	11 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	79.833.000,00	79.719.000,00	99,86	(114.000,00)
	12 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	179.987.000,00	179.895.500,00	99,95	(91.500,00)
	13 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	324.214.000,00	323.711.750,00	99,85	(502.250,00)
	14 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	204.967.000,00	204.575.000,00	99,81	(392.000,00)
	15 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	65.000.000,00	64.826.100,00	99,73	(173.900,00)
iii	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.181.921.371,00	1.177.215.121,00	99,60	(4.706.250,00)
	16 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	49.985.000,00	49.977.500,00	99,98	(7.500,00)
	17 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	199.718.371,00	199.718.371,00	100	-
	18 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	807.343.000,00	802.940.350,00	99,45	(4.402.650,00)
	19 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	55.000.000,00	54.765.400,00	99,57	(234.600,00)
	20 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	69.875.000,00	69.813.500,00	99,91	(61.500,00)
iv	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	648.415.500,00	632.459.400,00	97,54	(15.956.100,00)
	21 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000,00	99.678.000,00	99,68	(322.000,00)
	22 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	416.415.500,00	406.014.500,00	97,50	(10.401.000,00)
	23 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	130.000.000,00	124.766.900,00	95,97	(5.233.100,00)
	24 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
v	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.522.148.880,00	10.240.011.908,00	97,32	(282.136.972,00)
	25 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	575.000.000,00	574.671.000,00	99,94	(329.000,00)

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Refocussing (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Selisih Anggaran
1	2	3	4	5	6 = 4-3
26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.862.600.000,00	3.611.769.950,00	93,51	(250.830.050,00)
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.483.800.000,00	2.480.049.026,00	99,85	(3.750.974,00)
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.260.000.000,00	1.247.390.700,00	99,00	(12.609.300,00)
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.000.000,00	99.520.000,00	99,52	(480.000,00)
30	Fasilitasi Kunjungan Tamu	570.000.000,00	570.000.000,00	100	0,00
31	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	818.222.630,00	815.926.082,00	99,72	(2.296.548,00)
32	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	409.528.250,00	406.393.250,00	99,23	(3.135.000,00)
33	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	442.998.000,00	434.291.900,00	98,03	(8.706.100,00)
vi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.329.629.208,00	1.322.379.222,00	99,45	(7.249.986)
34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.050.000,00	23.050.000,00	100	0,00
35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.306.579.208,00	1.299.329.222,00	99,45	(7.249.986)
vii	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.336.123.643,00	4.107.612.326,00	94,73	(228.511.317)
36	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.150.585.400,00	1.060.046.375,00	92,13	(90.539.025)
37	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	488.561.381,00	386.961.201,00	79,20	(101.600.180)
38	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.300.088.472,00	1.270.851.000,00	97,75	(29.237.472)
39	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.396.888.390,00	1.389.753.750,00	99,49	(7.134.640)
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.314.694.033.116,00	3.519.168.784.958,22	81,56	(795.525.248.157,78)
i	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.902.677.684,00	3.729.966.597,00	95,57	(172.711.087,00)
40	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	413.484.700,00	407.418.114,00	98,53	(6.066.586,00)
41	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	384.725.500,00	384.671.100,00	99,99	(54.400,00)
42	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1.121.958.500,00	1.083.768.050,00	96,60	(38.190.450,00)
43	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1.010.727.246,00	998.903.646,00	98,83	(11.823.600,00)
44	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	971.781.738,00	855.205.687,00	88,00	(116.576.051,00)
ii	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	2.006.081.650,00	1.844.365.691,00	91,94	(161.715.959,00)
45	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	794.367.650,00	724.073.396,00	91,15	(70.294.254,00)
46	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	835.664.000,00	759.025.275,00	90,83	(76.638.725,00)
47	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	376.050.000,00	361.267.020,00	96,07	(14.782.980,00)
iii	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	2.726.634.685,00	2.656.838.443,00	97,44	(69.796.242,00)
48	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	799.850.000,00	797.978.850,00	99,77	(1.871.150)
49	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	407.181.685,00	342.247.973,00	84,05	(64.933.712,00)

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Refocussing (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Selisih Anggaran
1	2	3	4	5	6 = 4-3
	50 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	226.468.000,00	225.790.500,00	99,70	(677.500,00)
	51 Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	521.510.000,00	520.926.840,00	99,89	(583.160,00)
	52 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	771.625.000,00	769.894.280,00	99,78	(1.730.720,00)
iv	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	1.840.344.963,00	1.815.944.895,00	98,67	(24.400.068,00)
	53 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	746.714.963,00	746.179.937,00	99,93	(535.026,00)
	54 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	494.600.000,00	493.417.258,00	99,76	(1.182.742,00)
	55 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	599.030.000,00	576.347.700,00	96,21	(22.682.300,00)
v	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.304.218.294.134,00	3.509.121.669.332,22	81,53	(795.096.624.801,78)
	56 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	9.000.000.000,00	8.817.133.280,00	97,97	(182.866.720,00)
	57 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	2.070.605.776.926,00	1.321.185.777.481,22	63,81	(749.419.999.444,78)
	58 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5.000.000.000,00	0,00	0,00	(5.000.000.000,00)
	59 Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	2.219.612.517.208	2.179.118.758.571	98,18	(40.493.758.637)
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	6.075.227.060,00	5.598.346.720,00	92,15	(476.880.340,00)
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.075.227.060,00	5.598.346.720,00	92,15	(476.880.340,00)
	60 Penyusunan Standar Harga	964.350.000,00	960.082.740,00	99,56	(4.267.260,00)
	61 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	39.165.000,00	78,33	(10.835.000,00)
	62 Penatausahaan Barang Milik Daerah	205.510.713,00	185.532.713,00	90,28	(19.978.000,00)
	63 Pengamanan Barang Milik Daerah	1.779.000.000,00	1.503.454.970,00	84,51	(275.545.030,00)
	64 Penilaian Barang Milik Daerah	303.000.000,00	297.895.288,00	98,32	(5.104.712,00)
	65 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	958.556.400,00	889.181.611,00	92,76	(69.374.789,00)
	66 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	709.500.000,00	688.417.179,00	97,03	(21.082.821,00)
	67 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	910.893.310,00	845.032.582,00	92,77	(65.860.728,00)
	68 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	194.416.637,00	189.584.637,00	97,51	(4.832.000,00)
	Jumlah : 68 sub kegiatan	4.359.051.465.402,00	3.561.041.303.901,22	81,69	(798.010.161.500,78)

Dari data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada Tahun Anggaran 2023, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 Urusan, 3 Program dan 13 Kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp4.359.051.465.402,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp3.561.041.303.901,22 dengan persentase sebesar 81,69% dengan sisa anggaran sebesar Rp798.010.161.500,78.

1. Sub Kegiatan yang belum mencapai target realisasi anggaran (kurang dari 90%) meliputi :
 - a. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian 88,29%.
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan capaian 79,20%.
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan capaian 88%.
 - d. Penatausahaan Pembiayaan Daerah dengan capaian 84,05%.
 - e. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan capaian 63,81%.
 - f. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak belum direalisasikan;
 - g. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan capaian 78,33%.
 - h. Pengamanan Barang Milik Daerah dengan capaian 84,51%.

Adapun beberapa indikator yang mengalami penurunan seperti :

1. Penurunan indikator kinerja pada pengelolaan aset, hal ini dikarenakan adanya kendala pada pengamanan data/dokumen yang berkaitan dengan seluruh aset-aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Penurunan indikator Penatausahaan Keuangan yang baik dikarenakan terdapat 2 (dua) kegiatan) yaitu
 - a. Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan dengan capaian 70%, hal disebabkan karena kemampuan keuangan daerah yang tidak memadai.
 - b. Kegiatan Pengelolaan Dana Dana Darurat dan Mendesak yang tidak ada realisasi. Bahwa tidak ada permohonan dari Organisasi Perangkat Daerah untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga.

3. Penurunan pada Persentase Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan benar, hal ini dikarenakan 1 (satu) kabupaten yang terlambat menyampaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya untuk memenuhi target akhir Rencana Strategis Tahun 2024-2026, antara lain melalui perbaikan dokumen perencanaan, monitoring kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan evaluasi internal secara periodik melalui pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatra Selatan Nomor 68 Tahun 2016 Pasal 2 merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap Target dan Realisasi Indikator Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (th. n-3)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	- Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur APBD yang tepat waktu - <i>Budget Execution</i>			Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Belum ada	Tepat Waktu	Tepat Waktu		
				0% s.d 5%	0% s.d 5%	0% s.d 5%	0% s.d 5%	7%	Belum ada	0% s.d 5%	0% s.d 5%			
2	Persentase Pencapaian yang Sesuai dengan Aturan (Sisdur) dan Tepat Waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Persentase Kesesuaian antara Aset Lancar dan Aset Tetap dengan Catatan atas Laporan Keuangan dan Bukti Dokumen			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Belum ada	WTP	WTP	Laporan Keuangan-Organisasi Perangkat Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang dikirim ke BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melalui bidang akuntansi dan pelaporan	

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Rencana Strategis Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022 (th. n-3)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)	Tahun 2023 (th. n-2)	Tahun 2024 (th. n-1)	Tahun 2025 (th. n1)	Tahun 2026 (th. n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4	- <i>Asset Management</i> - Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk mengetahui kondisi aset, maka setelah data aset diinput dalam SIMDA BMD, kemudian akan dilakukan cek fisik terhadap aset tersebut.
5	Persentase APBD/APBDP Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan benar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Laporan Pertanggung jawaban APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Adapun hasil analisis dari pencapaian target tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dengan Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas yang Didukung Aparatur Pemerintah yang Jujur, Berintegritas, Profesional, dan Responsif dengan indikator kinerja yaitu **"Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan"**, telah sesuai target, dimana realisasinya Provinsi Sumatera Selatan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap target yang tercantum dalam dokumen perencanaan, baik Rencana Kerja Tahun 2025 maupun Rencana Strategis Tahun 2022-2026 sudah cukup baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Capaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Opini Laporan Keuangan Daerah	Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian	Perlunya pembinaan staf dalam mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian
2	Pelatihan teknis dibidang Pengelola Keuangan Daerah dan Pengelola Aset Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti pelatihan teknis	Sumber Daya Manusia yang berminat mengikuti pelatihan teknis
3	Aset-aset Provinsi Sumsel yang belum bersertifikat	Aset yang tersebar diwilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan	Status kepemilikan aset tanah tanah yang tumpang tindih dengan pihak lain
4	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR) yang belum terselesaikan.	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR) yang lama belum terselesaikan	Banyaknya ASN dan Pegawai Pensiunan yang tidak disiplin membayar hutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian (TP-TGR)
5	Sarana dan prasarana kerja	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Sarana dan prasarana belum ada Gudang kantor yang tetap
6	Disiplin aparatur	Kurangnya disiplin aparatur	Kurangnya pembinaan terhadap aparatur

Dari tabel di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya menyelesaikan permasalahan yang ada, diantaranya adalah penyelesaian aset-aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, belum tersedianya data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan penyelesaian kasus Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Dari tabel di atas kendala-kendala yang dihadapi dalam pengurusan aset pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Aset tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan banyak dikuasai masyarakat/tumpang tindih kepemilikan.

2. Aset rumah negara dikuasai oleh pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang turun-temurun diteruskan oleh ahli waris.
3. Bukti kepemilikan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang tidak kuat/hanya memiliki *copy*.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Tim Aset dalam pengelolaan aset pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Dalam percepatan proses sertifikasi aset daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengadakan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kanwil Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Sumatera Selatan.
2. Dalam pengamanan aset tanah dan rumah negara telah dilakukan proses pemasangan plang nama milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pemagaran secara keliling.
3. Secara hukum pengamanan aset dilakukan proses sertifikasi melalui Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) setempat.

Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Adanya kebijakan "Satu Data Indonesia" sebagai implementasi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang mewajibkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Sistem Pengelola Keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran.
3. Mendata seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Melakukan inventarisasi seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Dinamika regulasi bidang Pengelola keuangan yang berpengaruh terhadap pemahaman Sumber Daya Manusia, khususnya pelayanan administrasi keuangan yang meliputi aspek perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sehingga perlu meningkatkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja Pemerintahan yang lebih akuntabel dalam mencapai *Good Governance*.
7. Optimalisasi Pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam Bidang Urusan Keuangan Daerah.

b. Peluang

1. Perkembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
2. Terdapat sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD provinsi (pihak swasta) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah kearah yang lebih baik sesuai Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.
3. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
4. Adanya peluang investasi dari pihak asing di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Karena itu kedepan perlu diupayakan pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan target Rencana Pembangunan Daerah tersebut.

Berdasarkan analisis kritikal tersebut maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Bagaimana mensosialisasikan segera peraturan baru dibidang keuangan dan aset daerah.
2. Bagaimana mengembangkan sistem pengelola keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
3. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelola keuangan kabupaten/kota secara periodik.
4. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

5. Bagaimana meningkatkan optimalisasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.
6. Bagaimana menerapkan pembentukan satuan tugas khusus penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.
7. Bagaimana meningkatkan daya dukung sarana prasarana.
8. Bagaimana meningkatkan koordinasi antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bagaimana meningkatkan disiplin pegawai.

2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi *eksisting* Organisasi Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Telaahan terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 2.5 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Cabatan Penting
	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
5	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	3	4	5	6	UNSUBUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8	9	10	11	12
5 02	KEUANGAN				3.271.989.774.912,00	KEUANGAN				3.491.889.456.657,00	
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				64.678.630.418,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				88.181.646.418,00	
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.377.200.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.147.200.000,00	
5 02 01 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
		Palembang	Jumlah Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat Daerah	2 Buku	Jumlah Perencanaan Daerah	Palembang	Dokumen Perangkat Daerah	2 Buku	197.600.000,00	
5 02 01 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	187.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	217.500.000,00	
5 02 01 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	142.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	192.500.000,00	
5 02 01 1.01	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	138.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	164.000.000,00	
5 02 01 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	128.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	173.000.000,00	

Nomor			Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
			Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana (Rp)	
1	5 02 01	1.01	0006	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Buku	116.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Buku	166.000.000,00	
5 02 01	1.01			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	536.400.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	1.036.400.000,00	
5 02 01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				28.851.247.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				34.082.713.000,00	
5 02 01	1.02		0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 ASN/Orang/ Bulan	24.000.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	217 ASN/Orang/ Bulan	28.864.926.000,00	
5 02 01	1.02		0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 ASN, 85 Non ASN	3.235.687.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5 ASN, 85 Non ASN	3.235.687.000,00	
5 02 01	1.02		0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator	792.160.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator	1.020.000.000,00	
5 02 01	1.02		0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	65.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10 Dokumen	165.000.000,00	
5 02 01	1.02		0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	200.000.000,00	

Nomor	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palembang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Laporan	403.400.000,00	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palembang	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Laporan	392.100.000,00	
5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Laporan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	155.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Laporan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	155.000.000,00	
5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palembang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	50.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palembang	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	50.000.000,00	
5.02.01.1.03.0001	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	40 Laporan	1.278.843.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	40 Laporan	1.140.393.000,00	
5.02.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Save Deposit Box, 21 Unit, 20 Dokumen	215.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15 Save Deposit Box, 21 Unit, 20 Dokumen	270.000.000,00	
5.02.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	883.843.000,00	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	590.393.000,00	
5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	55.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	55.000.000,00	

Nomor		Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
		Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan	4 Laporan	70.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan	4 Laporan	120.000.000,00	
5 02 01 1.05												
5 02 01 1.05	0002	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	1.270.250.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	1.590.250.000,00	
5 02 01 1.05	0003	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	600.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	800.000.000,00	
5 02 01 1.05	0003	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	415.250.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	415.250.000,00	
5 02 01 1.05	0005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	55.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	75.000.000,00	
5 02 01 1.05	0009	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	200.000.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	300.000.000,00	
5 02 01 1.06	0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	11.263.690.418,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	14.013.690.418,00	
5 02 01 1.06	0001	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	1.400.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	1.400.000.000,00	
5 02 01 1.06	0002	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	3.609.890.418,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	6.109.890.418,00	
5 02 01 1.06	0004	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	1.950.000.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	100 Orang/ 4 Setel	1.950.000.000,00	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
Nomor	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.06 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palimbang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Jenis yang di Cetak, 45 Counter	994.391.950,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palimbang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40 Jenis yang di Cetak, 45 Counter	994.391.950,00	
5 02 01 1.06 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palimbang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Surat Kabar	52.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Palimbang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Surat Kabar	102.500.000,00	
5 02 01 1.06 0008	Facilitasi Kunjungan Tamu	Palimbang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	13.000 Tamu	210.000.000,00	Facilitasi Kunjungan Tamu	Palimbang	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	13.000 Tamu	260.000.000,00	
5 02 01 1.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palimbang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Kali dalam Daerah, 250 Kali Luar Daerah	1.280.508.050,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palimbang	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Kali dalam Daerah, 250 Kali Luar Daerah	1.280.508.050,00	
5 02 01 1.06 0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palimbang	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	917.400.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palimbang	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	917.400.000,00	
5 02 01 1.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palimbang	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Aplikasi	849.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palimbang	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	7 Aplikasi	999.000.000,00	
5 02 01 1.07 0001	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palimbang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Palimbang	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	30.000.000.000,00	
5 02 01 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palimbang	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palimbang	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	800.000.000,00	
5 02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Palimbang	Tersedianya Mebel	1 Paket		Pengadaan Mebel	Palimbang	Tersedianya Mebel	1 Paket	2.200.000.000,00	

Hasil Analisis Kebutuhan											
Rancangan Awal RKPD											
Nomor	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit Gedung Kantor		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit Gedung Kantor	27.000.000.000,00	
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.653.050.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.653.050.000,00	
5 02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200 surat	40.250.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200 surat	60.250.000,00	
5 02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	1.612.800.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	1.612.800.000,00	
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				16.984.250.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.534.250.000,00	
5 02 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 R4, 19 R2	1.005.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 R4, 19 R2	1.005.000.000,00	
5 02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	18 R4, 1 R2	334.250.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Periznannya	18 R4, 1 R2	384.250.000,00	
5 02 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis Peralatan dan Mesin	1.145.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palembang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Jenis Peralatan dan Mesin	1.145.000.000,00	
5 02 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Unit Rumah Dinas	16.500.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Unit Rumah Dinas	1.000.000.000,00	

Nomor			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
5 02 02	1.01	1.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 02	1.01	1.01	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				3.198.142.046.285,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				3.394.513.235.289,00	
5 02 02	1.01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				5.355.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				5.915.000.000,00	
5 02 02	1.01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	360.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	400.000.000,00	
5 02 02	1.01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	360.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	400.000.000,00	
5 02 02	1.01	1.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Palembang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	300.000.000,00	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Palembang	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	300.000.000,00	
5 02 02	1.01	1.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	40 Dokumen	300.000.000,00	
5 02 02	1.01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	100 buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperdub dan 100 buku Pergub	1.200.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	100 buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperdub dan 100 buku Pergub	1.200.000.000,00	
5 02 02	1.01	1.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	100 buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperdub dan 100 buku Pergub	1.150.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	100 buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Raperdub dan 100 buku Pergub	1.150.000.000,00	

Nomor		Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
		Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
5	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	1.985.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Palembang	Jumlah Dokumen Regulasi sebagai Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen	2.165.000.000,00	12
5	02	1.02	0002	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	17 Dokumen	1.726.550.000,00	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 Dokumen	770.000.000,00	
5	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	17 Dokumen	670.000.000,00	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 Dokumen	770.000.000,00	
5	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	17 Dokumen	670.000.000,00	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	17 Dokumen	770.000.000,00	
5	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	12 Laporan	564.250.000,00	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Laporan	564.250.000,00	

Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting	
Nomor	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 02 1.03 0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	SMI	-	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	SMI	-	
5 02 1.03 0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	155.000.000,00	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	155.000.000,00	
5 02 1.03 0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	324.000.000,00	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	324.000.000,00	
5 02 1.03 0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40 OPD	512.000.000,00	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40 OPD	512.000.000,00	
5 02 1.04 0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.832.850.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				1.844.130.000,00	
5 02 1.04 0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Beban	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Beban	617 Buku	658.700.000,00	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Beban	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, dan Beban	617 Buku	670.000.000,00	

Nomor			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
5 02	02	1.04	0004	Palimbang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemprov. Sumsel	588.600.000,00	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Palimbang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemprov. Sumsel	588.600.000,00	12
5 02	02	1.04	0005	Palimbang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	585.530.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Palimbang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	585.530.000,00	
5 02	02	1.05	0008	Palimbang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	1.154.215.699.159,00	Peninjauan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Palimbang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	1.716.182.298.350,00	
5 02	02	1.05	0009	Palimbang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	85.593.695.682,00	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Palimbang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	50.000.000.000,00	
5 02	02	1.05	0010	Palimbang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	1.947.863.021.424,00	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Palimbang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	1.516.796.556.949,00	
5 02	03	1.01	0001	Palimbang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Buku, 40 OPD	9.168.188.229,00	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah	Palimbang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Buku, 40 OPD	9.194.673.940,00	
5 02	03	1.01	0001	Palimbang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Buku, 40 OPD	295.000.000,00	Penyusunan Standar Harga	Palimbang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Buku, 40 OPD	295.000.000,00	

Nomor			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatorif (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	50.000.000,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	40 Laporan	85.000.000,00	12
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	450.200.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah	40 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Aih Status, 10 SK Penghapusan Aset	450.200.000,00	
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	3.042.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Pengamanan Barang Milik Daerah	40 OPD	2.982.000.000,00	
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	360.000.000,00	Penilaian Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah	80 Laporan Penilaian BMD	430.000.000,00	
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.558.660.832,00	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Sertifikat, BPKB Kendaran Bermotor, Pengamanan BMD	2.558.660.832,00	
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.293.500.000,00	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	25 SK/Mo/UPKS (kerjasama)	1.293.500.000,00	

Nomor			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
			Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana (Rp)	
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 Rekon BMD dengan OPD dan 452 BA Rekon dg SMA/SMK/ SLB	769.837.397,00	Palembang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	40 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dengan OPD dan 452 BA Rekon dg SMA/SMK/ SLB	770.313.108,00	
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	350.000.000,00	Palembang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	350.000.000,00	
							TOTAL						3.491.889.455.657,00
							3.271.989.774.912,00						

Dari Data sebagaimana tabel 2.5 diatas, Review Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2025, sebagai berikut:

- 1) Tahun 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 1 Urusan dengan pagu sebesar Rp3.491.889.455.657,00;
- 2) Dari 1 Urusan, melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dengan 71 Sub Kegiatan dan 71 Indikator Kinerja Sub Kegiatan.

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
URUSAN KEUANGAN					
USULAN NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Rencana Kerja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Adapun tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, yang kemudian menjadi tujuan dari Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, yaitu :

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme dengan Mengedepankan Transparansi dan Akuntabilitas yang Didukung Aparatur Pemerintah yang Jujur, Berintegritas, Profesional, dan Responsif”

Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mudah harus terukur dan kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Tahun 2024-2026, merupakan pelaksanaan periode keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah **“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”**.

Untuk mendorong tercapainya visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, maka peran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pengelola keuangan dan aset daerah dengan fungsi yaitu, perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelola keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelola keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjawab Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 diuraikan pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun			
				2024	2025	2026	2027
(1)	(2)		(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1 Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	1.1.1	Penganggaran yang Baik	a. Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur APBD yang tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			b. Budget Execution: Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total Dalam APBD	5% s.d 0%	5% s.d 0%	5% s.d 0%	5% s.d 0%
	1.1.2	Penatausahaan Keuangan yang Baik	Persentase dokumen pencairan yang baik sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
	1.1.3	Pelaporan Keuangan yang Baik	Persentase Kesesuaian Antara Aset Lancar dan Aset Tetap dan Catatan atas Laporan Keuangan dan Bukti Dokumen	WTP	WTP	WTP	WTP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun			
			2024	2025	2026	2027
			(5)	(6)	(7)	(8)
	1.1.4 Pengelola Aset yang Baik	a. Asset Management	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
1.2 Kabupaten/Kota yang berkualitas mengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.2.1 APBD Kabupaten/Kota yang Baik	a. Persentase APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu dan benar	100%	100%	100%	100%
	1.2.2 Persentase Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota yang Baik	b. Laporan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun Anggaran 2025, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjalankan 3 (tiga) Program, yang meliputi :

1. Program Pengelola Keuangan Daerah

Program Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengawal aktivitas Pengelola keuangan daerah provinsi, yang meliputi :

- a. Proses atau tahapan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang meliputi APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk Tahun Anggaran 2026, Aktivitas ini dilaksanakan melalui kegiatan Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah;
- b. Koordinasi pelaksanaan proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk penyusunan APBD Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Aktivitas ini dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. Koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan pada seluruh perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, termasuk didalamnya koordinasi dengan para *stakeholder* terkait seperti Perbankan, TASPEN, BPJS dan pelaporan pajak di Kantor Pajak, melalui kegiatan Koordinasi dan Pengelola Perbendaharaan Daerah;
- d. Melaksanakan Evaluasi APBD Kabupaten/Kota Se Sumatera Selatan, meliputi dokumen Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan APBD Tahun 2025 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk Tahun 2026. Selain itu termasuk juga aktivitas pembinaan Pengelola keuangan di Kabupaten/Kota. Berbagai aktivitas ini ditunjang melalui kegiatan Kabupaten/Kota dan Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah.

- e. Penatausahaan dana transfer ke Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan berupa Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Daerah, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Provinsi Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga. Aktivitas ini dilaksanakan melalui Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelola Keuangan Daerah.

2. Program Pengelola Barang Milik Daerah

Program Pengelola Barang Milik Daerah Tahun 2025 ini, merupakan program yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengawal aktivitas Pengelola aset daerah di lingkungan seluruh Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam kaitannya sebagai "Pengelola Barang Milik Daerah". Adapun aktivitasnya meliputi Perencanaan, Pemeliharaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengamanan dan Pemberdayaan Barang Milik Daerah melalui Kegiatan Pengelola Barang Milik Daerah.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025 ini, merupakan program yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengakomodir semua kebutuhan pelaksanaan pekerjaan Birokrasi baik pada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Program ini merupakan aktivitas "belanja yang bersifat mengikat" yang dibutuhkan oleh perangkat daerah untuk menjamin pelaksanaan pekerjaan birokrasi selama 12 (dua belas) bulan, seperti Belanja Gaji dan Tunjangan, Langganan Listrik, Air, Internet dan Telepon, Sarana Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional dan Gedung kantor, serta Logistik/Makan Minum.

Adapun pembiayaan aktivitas tersebut, dilaksanakan melalui 8 (delapan) kegiatan, meliputi :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; dan
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam angka menunjang Prioritas Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 dituangkan sebagaimana tabel 4.1 :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatiff (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatiff (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02	KEUANGAN				3.491.889.455.657,00				3.841.078.401.222,70
5 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				88.181.546.418,00				96.999.701.059,80
5 02 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.147.200.000,00				2.361.920.000,00
5 02 01 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	2 Buku	197.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Buku	217.580.000,00
5 02 01 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Palembang	1 Dokumen	217.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	239.250.000,00
5 02 01 1.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	1 Dokumen	192.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Dokumen	211.750.000,00

Kode	Pemendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	1	2		3	4	5	6		7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5 02 01 1.01 0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Kode	Permendagri/ 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5 02 01	1.02	0003	Palembang	3 Orang Bendahara, 1 Orang PPK dan 2 Orang Verifikator	1.020.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3	10
5 02 01	1.02	0004	Palembang	10 Dokumen	165.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Dokumen	181.500.000,00
5 02 01	1.02	0005	Palembang	1 Dokumen	200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	220.000.000,00
5 02 01	1.02	0006	Palembang	3 Laporan	392.100.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	431.310.000,00
5 02 01	1.02	0007	Palembang	3 Laporan	155.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	170.500.000,00
5 02 01	1.02	0008	Palembang	1 Laporan	50.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan	55.000.000,00

Kode	Pemendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
	1	2		3	4	5	6		7	8	9	10
5 02 01 1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										1.254.432.300,00
5 02 01 1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	40 Laporan	105.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Laporan			115.500.000,00
5 02 01 1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	15 Save Deposit Box, 21 Unit , 20 Dokumen	270.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		15 Save Deposit Box, 21 Unit , 20 Dokumen			297.000.000,00
5 02 01 1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	1 Laporan	590.393.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan			649.432.300,00
5 02 01 1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	1 Laporan	55.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan			60.500.000,00
5 02 01 1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD										
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	4 Laporan	120.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 Laporan			132.000.000,00
5 02 01 1.05		Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah										1.749.275.000,00
5 02 01 1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Palembang	100 Orang/ 4 Setel	800.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Orang/ 4 Setel			880.000.000,00

Kode	Pemendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2		3	4	5	6		7	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1											
5 02 01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	3 Laporan	415.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 Laporan	456.775.000,00	
5 02 01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palembang	13 Laporan	75.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13 Laporan	82.500.000,00	
5 02 01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Palembang	30 Orang	300.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		30 Orang	330.000.000,00	
5 02 01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			14.013.690.418,00				15.415.059.459,80	
5 02 01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Palembang	41 Jenis	1.400.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		41 Jenis	1.540.000.000,00	
5 02 01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Palembang	Mesin Scanner, Printer, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	6.109.890.418,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Mesin Scanner, Pninter, Komputer, Laptop, Alat Penghancur Kertas	6.720.879.459,80	
5 02 01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Palembang	10 Jenis Alat Pembersih dan 50 Jenis Bahan Pembersih	1.950.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		10 Jenis Alat Pembersih dan 50 Jenis Bahan Pembersih	2.145.000.000.000,00	

Kode			Permendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
5 02	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Palembang	40 Jenis yang Dicetak, 45 Counter	994.391.950,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Jenis yang Dicetak, 45 Counter	1.093.831.145,00	
5 02	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Palembang	7 Surat Kabar	102.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Surat Kabar	112.750.000,00	
5 02	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	13.000 Tamu	260.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		13.000 Tamu	286.000.000,00	
5 02	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	300 Kali dalam Daerah, dan 250 Kali Luar Daerah	1.280.508.050,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		300 Kali Dalam Daerah, dan 250 Kali Luar Daerah	1.408.558.855,00	
5 02	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	917.400.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	1.009.140.000,00	
5 02	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	7 Aplikasi	999.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		7 Aplikasi	1.098.900.000,00	
5 02	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	Palembang		30.000.000.000,00				33.000.000.000,00	
5 02	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	1 Unit	800.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit	880.000.000,00	

Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 01 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Palembang	1 Paket	2.200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Paket	2.420.000.000,00
5 02 01 1.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Palembang	1 Unit Gedung Kantor	27.000.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Unit Gedung Kantor	29.700.000.000,00
5 02 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.673.050.000,00				1.840.355.000,00
5 02 01 1.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	1.200 surat	60.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.200 surat	66.275.000,00
5 02 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Palembang	6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	1.612.800.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		6 Rekening Listrik, 8 Rekening Telepon, 6 Rekening Air, 12 Rekening Internet	1.774.080.000,00
5 02 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.534.250.000,00				3.887.675.000,00
5 02 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Palembang	27 R4, 19 R2	1.005.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		27 R4, 19 R2	1.105.500.000,00
5 02 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Palembang	18 R4, 1 R2	384.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		18 R4, 1 R2	422.675.000,00

Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
	1	2		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
5 02 01 1.09 0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	5	6	7	8	9	10
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Palembang	2 Jenis Peralatan dan Mesin	1.145.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Jenis Peralatan dan Mesin	1.259.500.000,00
5 02 01 1.09 0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Unit Rumah Dinas	1.000.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Unit Gedung Kantor, 1 Gudang Arsip, 3 Unit Rumah Dinas	1.100.000.000,00
5 02 02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH							3.733.964.558.828,90
5 02 1.01			Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				5.915.000.000,00			6.508.500.000,00
5 02 1.01 0001			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS							
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Palembang	100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	400.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Buku Rancangan KUA, 100 Buku KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku PPAS	440.000.000,00
5 02 1.01 0002			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS							
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Palembang	100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 Buku Perubahan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku Perubahan PPAS	400.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Buku Rancangan Perubahan KUA, 100 Buku Perubahan KUA, 100 Buku Rancangan PPAS, 100 Buku Perubahan PPAS	440.000.000,00
5 02 1.01 0003			Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD							
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Palembang	40 Dokumen	300.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Dokumen	330.000.000,00

Kode			Pemendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerjanya	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerjanya	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5 02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD							
				Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Palembang	40 Dokumen	300.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Dokumen	330.000.000,00
5 02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD							
				Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Palembang	100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Rapergub dan 100 Buku Pergub	1.200.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Rapergub dan 100 Buku Pergub	1.320.000.000,00
5 02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD							
				Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Palembang	100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Rapergub dan 100 Buku Pergub	1.150.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		100 Buku Raperda, 100 Buku Perda, 100 Buku Rapergub dan 100 Buku Pergub	1.265.000.000,00
5 02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran							
				Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Palembang	1 Dokumen	2.165.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Dokumen	2.381.500.000,00
5 02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota							
5 02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota							
				Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Palembang	17 Dokumen	770.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Dokumen	847.000.000,00

Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317) Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatiff (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatiff (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5 02 1.02 0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Palembang	17 Dokumen	770.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Dokumen	847.000.000,00
5 02 1.02 0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Palembang	17 Dokumen	680.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Dokumen	748.000.000,00
5 02 1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				1.555.250.000,00				1.710.775.000,00
5 02 1.03 0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Palembang	12 Laporan	564.250.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 Laporan	620.675.000,00
5 02 1.03 0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Palembang	SMI		Pendapatan Asli Daerah (PAD)		SMI	

Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
5 02	02	1.03	0005	Koordinasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	170.500.000,00			
5 02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	356.400.000,00			
5 02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	40 OPD	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	563.200.000,00			
5 02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				2.028.543.000,00			
5 02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	617 buku	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	737.000.000,00			

Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
	Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	2	3	4	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)			
5 02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah								10	
				Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Palembang	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemprov. Sumsel	588.600.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemprov. Sumsel		647.460.000,00	
5 02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi									
				Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Palembang	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi	585.530.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan 1 Rapergub tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi		644.083.000,00	
5 02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									3.721.276.740.828,90
5 02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan									
				Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Palembang	17 Kab/Kota	1.716.182.298.350,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Kab/Kota		1.887.800.528.185,00	
5 02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak									
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Palembang	17 Kab/Kota	50.000.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Kab/Kota		55.000.000.000,00	
5 02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi									
				Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Palembang	17 Kab/Kota	1.616.796.556.949,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		17 Kab/Kota		1.778.476.212.643,90	

Kode		Permendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317) Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	
5 02 03	1.01	0001	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4	5	6	7	8	9	10	
5 02 03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			9.194.673.940,00				10.114.141.334,00	
5 02 03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga			9.194.673.940,00				10.114.141.334,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	Palembang	2 Buku, 40 OPD	295.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 Buku, 40 OPD	324.500.000,00	
5 02 03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Palembang	40 Laporan	65.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 Laporan	71.500.000,00	
5 02 03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Palembang	40 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	450.200.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 SK Gubernur Penetapan Status, 5 SK Alih Status, 10 SK Penghapusan Aset	495.220.000,00	
5 02 03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Palembang	40 OPD	2.982.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		40 OPD	3.280.200.000,00	
5 02 03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Palembang	80 Laporan Penilaian BMD	430.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		80 Laporan Penilaian BMD	473.000.000,00	
5 02 03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah								
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Palembang	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.558.660.832,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.814.526.915,20	

Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (kemendagri 900-1317)		Indikator Kinerja Program/Kegiatan /Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
	5 02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Palembang	25 SK/MoU/PKS (Kerjasama)		1.293.500.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	25 SK/MoU/PKS (Kerjasama)	1.422.850.000,00
5 02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	40 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dengan OPD dan 452 BA Rekon dg SMA/SMIK/ SLB	770.313.108,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	40 Laporan Rekon PerTriwulan, 40 BA Rekon BMD dengan OPD dan 452 BA Rekon dg SMA/SMIK/ SLB	847.344.418,80		
5 02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Palembang	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	350.000.000,00	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Laporan BMD Tahunan dan 1 Laporan BMD Semesteran	385.000.000,00		
TOTAL											3.491.889.455.657,00	3.841.078.401.222,70	

Dari data sebagaimana tabel 4.1 diatas, Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 serta Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

- 1) Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, melaksanakan 1 Urusan, 3 Program, dan 13 Kegiatan dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan, dan 68 Sub Kegiatan dengan 68 Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp3.491.889.455.657,00.
- 2) Prakiraan Maju Tahun 2026, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan 1 Urusan, 3 Program, dan 13 Kegiatan dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan, dan 68 Sub Kegiatan dengan 68 Indikator Kinerja Sub Kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp3.841.078.401.222,70.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu Tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perumusan program dan kegiatan beserta indikator pada Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini berpedoman pada Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Rencana Strategis untuk Tahun 2025 telah termuat dalam Rencana Kerja. Selain itu terdapat penambahan output/keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
- 3) Penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
- 4) Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini adalah akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 untuk setiap triwulannya. Selanjutnya program dan kegiatan pada Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan/pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025.